

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARIWISATA DI KOTA BATU PADA  
MASA PANDEMI *COVID-19*  
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh :**

**FRUDENSIUS OVALDRI  
2016110067**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2021**

## ABSTRAK

Wabah pandemi telah meluluhlantakkan sektor ekonomi dunia maupun Indonesia khususnya. Hampir semua sektor telah merasakan dampak dari pandemi *Covid-19*, mulai dari ekonomi, pembelajaran, sosial, pariwisata serta sebagainya (Suhendri, et.al, 2021). Industri pariwisata menjadi salah satu industri yang paling terdampak pandemi. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu menjadi lokasi kajian ini, dan fokus kajiannya adalah pada penerimaan pajak di Kota Batu pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan industri pariwisata di Kota Batu selama pandemi. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini.

Mengingat akibat dari Eksplorasi yang diarahkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu sampai dengan Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dinas Pariwisata di Kota Batu Pada Masa Pandemi Corona, bahwa pencapaian yang terjadi dari target dan merealisasikan penerimaan pajak pariwisata pada tahun 2020 sebesar 124,14% dan dari pencapaian tersebut dapat dikategorikan sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2021, hanya sebesar 98,89%, dari target dan realisasi yang dihasilkan, Sehingga pencapaiannya dikategorikan sebagai efektif dengan tingkat persentase pencapaian di antara 90% - 100%.

**Kata Kunci** : Pariwisata, Pajak, Pandemi Covid-19

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada awal 2019, virus yang dikenal dengan nama *SARS-CoV-2* menyebar dari kota Wuhan di China hingga menjadi pandemi di seluruh dunia (Suhendri, et.al, 2022). Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan penyakit ini sebagai *COVID-19*. Dengan proliferasi *COVID-19* di seluruh planet ini, semua bidang kehidupan yang biasa kita jalani didorong untuk bergeser (Suhendri, et.al, 2021). Ungkapan "*new normal*" juga menjadi ungkapan populer di kalangan kebijakan publik pemerintah. Hadirnya *new normal* ini akan mempengaruhi jalannya kehidupan di tahun 2020 dengan mengurangi aktivitas keramaian melalui pemisahan sosial, cuci tangan, dan penggunaan masker saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terdampak, dan bahkan ada yang sampai meninggal karena terinfeksi oleh virus tersebut. Indonesia bukanlah satu-satunya Negara yang terdampak wabah *Covid-19*, hampir seluruh dunia juga menderita karena hal tersebut. Virus Corona (*COVID-19*) yang tengah terjadi telah menjadi kasus kesehatan global sejak awal kemunculannya dan bahkan sampai pada masa sekarang dan juga memunculkan akibat yang sangat besar terhadap seluruh lapisan kehidupan diseluruh dunia. Pada akhir April 2020 lalu, tercatat dari 210 Negara terdapat 3,5 juta orang yang masuk rumah sakit dan menjalani karantina mandiri akibat terjangkit virus corona. (Worldometer, 2020. Dalam Dedi Junaedi & Faisal Salistia, 2020).

Hampir semua sektor telah merasakan dampak dari pandemi *Covid-19*, mulai dari ekonomi, pembelajaran, sosial, pariwisata serta sebagainya (Suhendri, et.al, 2021). Perihal penyebabnya dikarenakan *Covid-19* memunculkan ada rasa takut akan bahaya serta resiko atas dasar kabar serta kenyataan yang tersebar bisa berujung pada kematian. Dampaknya timbul rasa kekhawatiran bagi warga dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya yang mungkin akan menular virus *Covid-19* ini.

Berdasarkan pernyataan WHO, Pandemi Covid-19 bermunculan di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2020. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam mengatasi wabah tersebut, dimana pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan guna menekan penyebaran virus yang telah mewabah di Indonesia dan bahkan di berbagai Negara. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam kebijakan ini, Pemerintah Indonesia menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak banyak melakukan aktifitas di luar rumah demi mengurangi penyebaran wabah penyakit yang satu ini.

Namun di lain sisi kebijakan tersebut juga banyak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Negara karena segala aktivitas masyarakat yang seharusnya dilakukan di luar rumah terpaksa terhenti karena pemberlakuan kebijakan oleh pemerintah yang mewajibkan publik standby di rumah selama aturan berlangsung. Selama pemberlakuan PSBB hampir semua kegiatan usaha maupun jasa terpaksa diberhentikan untuk sementara waktu maupun permanen (Budastra, 2020)(Suhendri, et.al, 2022).

Pemberlakuan PSBB oleh Pemerintah pada awal bulan April 2020 dalam

rangka menekan penyebaran *Covid-19* memberikan penyebab tumbuhnya ekonomi Indonesia pada kuartal 1 (Q1) 2020 tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Yang mana harapannya menjadi target pencapaian sekitar 4,5 sampai 4,6%, Namun yang didapat hanya mencapai 2,97 %. ( Edy Sutrisno, 2020).

Diantar yang berpengaruh oleh pandemi ini alah pada sektor Pariwisata. Dimana perlu kita ketahui bahwa Negara Indonesia memiliki potensi pariwisata yang cukup besar karena memiliki banyak pulau serta kekayaan alam yang melimpah. Karena hal itu, maka tidak heran jika sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Banyaknya tempat wisata dapat meningkatkan perekonomian Indonesia serta daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi wisata. Masyarakat setempat yang melakukan aktivitas usaha di sekitar tempat wisata juga tentunya akan memperoleh dampak terhadap pendapatan usaha yang mereka jalani jika terdapat banyak wisatawan yang berkunjung di tempat wisata yang berada di sekitar tempat usaha mereka. Sektor pariwisata merupakan salah satu efek ganda dimana terdapat beberapa usaha yang menunjang sektor pariwisata dalam keberlangsungan usaha, adapun usaha yang dimaksud seperti perhotelan, restoran, pedagang, dan lainnya yang juga mendukung sektor pariwisata. Menurut penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang dilakukan pada tahun 2018, multiplier effect di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian Indonesia.

Kontribusi industri pariwisata sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dimana industri pariwisata dapat menggali pendapatan yang cukup besar bagi

Negara maupun daerah setempat yang memiliki potensi di bidang pariwisata. Selain itu sektor pariwisata juga berperan dalam pendapatan devisa, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha. Tercatat pada tahun 2018 berpendapat devisa dari sektor pariwisata meningkat 15,4% secara tahunan, selain itu data dari Kemenparekraf juga mengatakan bahwa tenaga kerja di sektor pariwisata juga mengalami peningkatan yang tercapai 12,7 juta orang atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia yang bekerja.

Namun semenjak munculnya *Covid-19* di Indonesia membuat pendapatan pada sektor pariwisata menurun karena kuantitas wisatawan dari luar negara yang mau kunjungan pada Indonesia mengalami penurunan, selain itu masyarakat Indonesia juga enggan untuk mengunjungi tempat wisata di Tanah air karena takut akan virus yang satu ini, karena diketahui bahwa *Covid-19* merupakan salah satu penyakit menular. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, wisatawan yang melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2020 menurun 7,62% bila dibandingkan dengan bulan Desember pada tahun sebelumnya, yaitu 1,37 juta (Desy Tri Anggarini, 2021). Penurunan wisatawan asing yang berkunjung ke tanah air juga membawa dampak buruk bagi tenaga kerja di bidang pariwisata. Banyaknya sektor wisata yang berhenti beroperasi membuat tenaga kerja di bidang tersebut kehilangan pekerjaan dan berimbas pada pendapatan mereka. Selain tenaga kerja pelaku usaha pariwisata juga paling merasakan dampak buruk karena hal tersebut.

Dampak lain juga dirasakan pada penerimaan pajak, dimana sektor pariwisata ialah diantara sumbang pajak terbanyak di Indonesia, namun semenjak munculnya pandemi industri pariwisata mengalami penurunan yang cukup dalam.

Minimnya wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun lokal yang mengunjungi destinasi wisata yang ada di Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab yang berimbas pada penerimaan pajak. Jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu tolak ukur bagi penambahan pendapatan daerah maupun masyarakat setempat yang melakukan kegiatan usaha yang menunjang industri pariwisata. Dukungan fasilitas dan layanan yang disediakan dapat menjadi minat bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Semakin banyak pengeluaran para wisatawan maka semakin besar pendapatan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, maka tidak menutup kemungkinan meningkatnya pendapatan daerah setempat.

Pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pajak dari industri pariwisata. Dimana pajak hotel, restoran, dan hiburan, yang mendukung kegiatan pariwisata, menyumbang hampir semua penurunan penerimaan pajak. Menurut Eureka Putera, Kepala Dinas Subdirektorat DJP untuk potensi dampak kebijakan, kepatuhan, dan penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak sampai dengan Agustus 2020, 7,6 triliun adalah Rp. pertumbuhan ekonomi industri pariwisata nasional. Sejak tahun 2015, pembayaran pajak kepada industri secara konsisten meningkat dua digit, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 23%.

Salah satu destinasi wisata di provinsi Jawa Timur adalah Kota Batu. Kota Batu merupakan destinasi wisata yang populer karena pemandangan alamnya yang menakjubkan dan iklimnya yang menyegarkan. Tidak heran jika sektor wisata menjadi andalan bagi Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi industri pariwisata. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan hanyalah beberapa dari pajak yang termasuk dalam payung pajak industri pariwisata. Dengan menjumlahkan ketiga pajak tersebut maka akan didapat penerimaan pajak sektor pariwisata.

Namun belakangan ini kondisi sektor pariwisata di Kota Batu mengalami perubahan karena wabah pandemi yang memaksa pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat melalui penerapan PPKM. Pemberlakuan PPKM yang diterapkan Pemerintah demi mengurangi penyebaran wabah penyakit *Covid-19* ini tentunya membawa dampak buruk bagi sektor pariwisata Kota Batu. Semenjak pemberlakuan PPKM, mengakibatkan seluruh tempat wisata di Kota Batu ditutup sehingga kemungkinan akan berdampak pada pendapatan daerah Kota Batu itu sendiri.

Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerimaan pajak yang dihasilkan oleh sektor pariwisata selama masa pandemi Covid-19 di Kota Batu setelah mengetahui kejadian sebenarnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak industri pariwisata adalah: 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; dan 3. Pajak Hiburan. Ketiga pajak tersebut pada akhirnya akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yang tertuang dalam sebuah tesis berjudul: “Analisis Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Di Kota Batu Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui penguraian di atas sehingga timbul perumusan permasalahan seperti ini  
“Bagaimanakah Penerimaan Pajak Pariwisata di Kota Batu Pada Masa Pandemi  
*Covid-19*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset berikut memiliki tujuan sebagai mengetahui bagaimana Penerimaan  
Pajak Pariwisata Di Kota Batu Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang sudah terpaparkan sehingga riset berikut mempunyai  
harapan seperti berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan yang disajikan dalam riset ini berpotensi untuk menghasilkan literatur  
atau referensi baru yang memajukan pemahaman pembaca dan sarjana tentang  
ekonomi, khususnya perpajakan..

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a) Manfaat bagi akademisi :**

Dimaksudkan oleh para akademisi agar penelitian ini dapat menambah  
pengetahuan yang ada dan bermanfaat bagi para pembaca sebagai narasumber bagi  
kepentingan keilmuannya tentang Penerimaan Pajak Pariwisata Kota Batu. Di saat  
Pandemi *Covid-19*.

#### **b) Manfaat bagi wajib pajak**

Bagi pemerintah, temuan studi ini diharapkan dapat membantu industri  
pariwisata Kota Batu dan dapat memberikan data yang akurat tentang penerimaan

pajak pariwisata kota tersebut. Di saat Pandemi Covid-19

c) Manfaat Bagi Universitas

Sebagai narasumber dan pembimbing Universitas Tribhuwana Tungadewi, mahasiswa S1 Malang, khususnya yang terdaftar di program studi Akuntansi yang ingin melakukan penelitian tambahan tentang penerimaan pajak pariwisata di Kota Batu selama pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Purwanto. (2020). Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-kalimantan-tengah> 30 Mei 2021 Pukul 21.57.
- Almuttaqi, A. I. (2020). Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia. *The Insights*, 13.
- Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?. *The Lancet*, 395(10228), 931-934.
- Budiyanti, E. (2020). Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia. *Info Singkat XII*,(4).
- Bohlen, B., Carlotti, S., & Mihas, L. (2010). How the recession has changed US consumer behavior. *McKinsey Quarterly*, 1(4), 17-20.
- Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agrimansion*, 21(1), 48-57.
- Betty Silfia, Abdullah. (2021). Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan: Surabaya*.
- BPS Indonesia. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: BPS Indonesia
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. *Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah (2020)*. Kota Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22-37.
- Brata, dkk. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda". *Forum Ekonomi* ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X, Volume 19, No. 1 2017.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 21-28.
- Cucumandalin, Gde Otong, I Made Surya Wahyu Arsadi. 2021. Penerapan Pajak Terhadap Industry Pariwisata Di Masa Pandemi. Volume 2 Nomor 2, Oktober 2021. p-ISSN: 2723-7427, e-ISSN: - Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>
- Direktorat Jenderal Pajak. 29 Desember 2011. Surat Edaran Nomor SE - 98/PJ/2011. Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal
- Dityatama. 2015. The Influence of Internal Auditor's Competency and Independency to the Internal Auditor's Due Professional Care and the Implication to the Internal Audit Quality. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 6, No. 6, 2015. ISSN: 2222-1697 (Paper) ISSN: 2222-2847 (Online).
- Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. *Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (2020)*. Palangkar Raya: Disbudpar

- Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (2019). Palangkar Raya: Disbudpar
- Effendi, Muh. Taufik. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Elder, et al. 2010 Auditing Standards Committee Comment Letter PCAOB Rulemaking Docket Matte. SAS I (AU).
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: ISBN Undip.
- Gummala, Agung. Dkk. 2014. Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Jurnal Akuntansi. Universitas Bung Hatta. Padang.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Hapsari, A., & Kholis, N. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67.
- Indonesia Investients. (2016). *Industri Pariwisata Indonesia*”. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051?>, diakses pada 31 Mei 2021 pukul 20.32.
- Junaidi, dkk. 2022. “Analisis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Kota Batu”. Vol. 11, No.07 Februari 2022
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kartiko, Nafis Dwi. 2020. Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid- 19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020)*, Hal. 124-137
- Suhendri, H., Risnaningsih., & Iyel, I. 2022. Analysis of Financial Performance of Conventional and Islamic BUMN Banks Before and During the Covid-19 Pandemic. *(MEC-J) Management and Economics Journal*, Vol. 6 (2) : 147 – 156.
- Suhendri, H., Handayanto, A.J., & Hayani, N.I. 2021. Consequence of Merger Plan Announcement (Study on Stock Price of State-Owned Islamic Banks). *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 12 (22) : 55 – 58.
- Tobias, Brian Christabel, Try Willy Kristianto, Wijoko Lertariono. 2020. Strategi Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Pandemi Covid-19. *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. VIII, No. 01 Juni 2020*